

EFEKTIVITAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DESA (SAKIP DESA) DI DESA MEKARGALIH KABUPATEN SUMEDANG

¹Anggi Anggraeni, ²Neneng Yani Yuningsih, ³Ufa Anita Afrilia

^{1,3}Program Studi Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

E-mail Koresponden: anggi19004@mail.unpad.ac.id

Abstract

SAKIP Desa is an integration of the planning system, budgeting system and performance reporting system, which is in line with the implementation of the financial accountability system. Village SAKIP is a form of manifestation of Good Governance at the village government level that is effective and efficient, increases accountability of village performance in a sustainable manner, as well as good and quality public services. The implementation of Village SAKIP in Mekargalih Village has only been implemented in 2021, greatly assisting the Mekargalih village government in achieving performance targets. However, in the implementation of this Village SAKIP, there are problems, namely the lack of socialization of Village SAKIP, non-optimal resources, and the lack of quantity and quality of Mekargalih Village equipment. This applied research aims to determine and analyze and describe the Effectiveness of the Village Government Performance Accountability System (SAKIP Desa) in improving Village Government Accountability in Mekargalih Village. Applied research is carried out through qualitative descriptive research methods with data collection techniques by means of interviews, observations, documentation and literature studies. The effectiveness indicator used is the measurement of effectiveness according to Duncan with 3 indicators consisting of goal achievement, integration and adaptation. In addition, in this applied research, SWOT identification is carried out, namely strengths, weaknesses, opportunities and threats. The results of this applied research show that Village SAKIP in Mekargalih Village in improving transparency and accountability is still not effective, from the dimension of achieving goals that are not met overall in terms of timeliness and targets that are targeted in the established kinerja indicators. The integration dimension, socialization processes and procedures have not run as expected, and adaptation related to infrastructure facilities is adequate. After the identification of SWOT, alternative efforts emerged that can be made by the Mekargalih Village government to overcome these obstacles, one of which is to improve training and skill development programs with bimtek and in-depth socialization related to the implementation of Village SAKIP.

Keywords: Effectiveness, Village Government Performance Accountability System

Abstrak

SAKIP Desa ialah bentuk perwujudan Good Governance di tingkat pemerintahan Desa yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Implementasi SAKIP Desa di Desa Mekargalih baru dilaksanakan tahun 2021 sangat membantu pemerintah desa Mekargalih dalam mencapai target kinerja. Namun dalam penyelenggaraan SAKIP Desa ini, terdapat masalah-masalah yaitu minimnya sosialisasi SAKIP Desa, Sumberdaya yang tidak optimal, serta kurangnya kuantitas dan kualitas perangkat Desa Mekargalih. Riset terapan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis serta mendeskripsikan Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (SAKIP Desa) dalam meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa di Desa Mekargalih. Riset Terapan dilakukan melalui metode penelitian deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Adapun indikator efektivitas yang digunakan yaitu pengukuran efektivitas menurut Duncan dengan 3 indikator yang terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Selain itu, dalam riset terapan inidilakukan identifikasi SWOT yaitu faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Hasil riset terapan menunjukkan bahwa SAKIP Desa di Desa Mekargalih dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas masih belum efektif, dari pencapaian tujuan kurang terpenuhi secara keseluruhan dalam ketepatan waktu serta sasaran yang menjadi target dalam indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Integrasi, sosialisasi belum berjalan sesuai harapan, serta adaptasi terkait sarana prasarana cukup memadai. Setelah dilakukan identifikasi SWOT munculah upaya alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut salah satunya yaitu meningkatkan program pelatihan dan pengembangan keterampilan dengan bimtek dan sosialisasi secara mendalam terkait implementasi SAKIP Desa.

Kata kunci: Efektivitas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa

Latar Belakang

Salah satu cara menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah memiliki sistem pengukuran kinerja yang baik. pengukuran kinerja menggambarkan seberapa baik kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan yang dilakukan dengan waktu, biaya, serta kualitas yang optimal. Dalam rangka mendukung terlaksananya sistem pengukuran kinerja ini pemerintah indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Yang mana peraturan tersebut mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

misi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran ataupun target yang telah ditetapkan. Dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Di era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi yang sangat pesat dengan diiringi kemajuan sistem informasi yang berbasis teknologi sehingga dapat mempermudah pencatatan akuntabilitas kinerja di semua bidang termasuk bidang pemerintahan. Seperti penyelenggaraan SAKIP di beberapa instansi pemerintah sudah beralih pada SAKIP Elektronik (E- SAKIP), begitu juga

seperti SAKIP Desa di kabupaten sumedang dilakukan secara elektronik melalui penggunaan aplikasi e- Office Desa, sehingga memacu pengelolaan anggaran desa berbasis kinerja dan berorientasi hasil.

SAKIP Desa merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam SAKIP Desa di Kabupaten Sumedang, terdapat tiga prioritas sasaran utama, yakni penurunan angka kemiskinan, penurunan angka stunting, peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Dengan adanya aplikasi e-Office, seluruh target prioritas dalam SAKIP Desa tersebut dapat terpantau melalui *Command Center*, karena adanya integrasi data *real-time* melalui E-Office Desa. Sehingga hasilnya, target dapat terpenuhi, bahkan ada yang melampaui batas.

Untuk melaksanakan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (SAKIP DESA), telah ditetapkan dalam pengimplementasian SAKIP DESA ini berlandaskan langsung pada Peraturan Bupati Sumedang No. 86 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja Dan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa.

Penyelenggaraan SAKIP di desa Mekargalih baru dilaksanakan pada tahun 2021 yang diperkenalkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu aparatur desa mengatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP Desa di Desa Mekargalih sangat membantu perangkat desa dalam mencapai target kinerja. Karena sebelum adanya SAKIP Desa, Pekerjaan belum terpatok dengan hasilnya. Kemudian dengan adanya SAKIP Desa perangkat desa bekerja dengan memaksimalkan loyalitas dalam memberikan

pelayanan prima, sehingga pekerjaan menjadi teratur dan tertata kepada masyarakat.

Namun dalam penyelenggaraan SAKIP Desa ini, terdapat masalah-masalah yaitu minimnya sosialisasi SAKIP Desa aparatur Desa Mekargalih merasa kesulitan dalam Menyusun SAKIP Desa sehingga dalam pemenuhan dokumen adanya ketidakselarasan dokumen, Sumberdaya yang tidak optimal, sebagian perangkat desa kurang dilihat dari tingkat Pendidikan dan penguasaan alat kerja serta dalam kedisiplinannya masih kurang. serta kurangnya kuantitas dan kualitas perangkat Desa Mekargalih.

Selain permasalahan empiris, terdapat juga permasalahan teoritis dalam riset terapan ini menggunakan teori pengukuran efektivitas dari Duncan yang dapat diukur dengan tiga indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Pada pencapaian tujuan belum efektifnya pelaksanaan SAKIP Desa dikarenakan belum tercapainya sasaran yang diteliti ditentukan disebabkan sumber daya manusia perangkat Desa Mekargalih kurang maksimal, sehingga menyebabkan terlambatnya laporan SAKIP. Kemudian pada integrasi yaitu kurangnya sosialisasi SAKIP Desa yang menyebabkan aparatur Desa merasa kesulitan dalam menyusun SAKIP Desa sehingga dalam pemenuhan dokumen adanya ketidakselarasan-dokumen dokumennya. Dan yang terakhir adaptasi melalui tolak ukur peningkatan kemampuan sarana dan prasarana. Dalam hal ini dibuktikan dari kualitas dan kuantitas kerja perangkat Desa masih kurang baik, karena banyak aparatur yang tidak siap dan kesulitan dalam menginput pelaporan sehingga dilakukan oleh satu aparatur saja. Dan sebagian besar aparatur desa lambat atau lalai dalam mengerjakan tugas dan kewajibannya.

Metode

Riset terapan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa di Desa Mekargalih Kabupaten Sumedang. Untuk meraih pencapaian tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi serta penelitian ini juga menggunakan studi pustaka. Kemudian untuk teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan/verifikasi serta menggunakan identifikasi SWOT. Dalam penelitian ini memilih 6 informan dengan menentukan informan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Adapun teknik validasi data dalam penelitian ini terdiri dari triangulasi sumber, menggunakan bahan referensi dan mengadakan *membercheck*. Lokasi penelitian berada di Kantor Desa Mekargalih Kabupaten Sumedang.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Setelah dilakukannya penelitian terdapat hasil penelitian yang menjelaskan seberapa jauh tingkat efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (SAKIP Desa) di Desa Mekargalih. Dalam mengukur efektivitas, penulis menggunakan indikator efektivitas menurut Duncan yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi seperti berikut ini:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merujuk pada keberhasilan mencapai sasaran yang ditetapkan. Tujuan SAKIP Desa yaitu untuk mengukur keberhasilan serta mewujudkan pemerintahan Desa yang memiliki kapasitas dan akuntabilitas

kinerja desa. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan peran pemerintah desa mekargalih dalam menyelenggaraan SAKIP Desa sangat diperlukan. Ketepatan waktu serta penentuan sasaran yang tepat dapat membantu penyelenggaraan dalam membuat keputusan serta dalam proses pencapaian tujuan.

Dalam rangka meningkatkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di atas rencana-rencana sarasaran tersebut tercantum dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), yang di dalamnya sudah memuat 3 sasaran utama dalam SAKIP Desa Sumedang seperti rumah tangga miskin, penurunan angka stunting, dan kenaikan indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Desa Mekargalih. tiga sasaran utama tersebut pencapaiannya dari tahun ke tahun ada yang meningkat dan ada pula yang menurun seperti pada berikut:



Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa sasaran yang telah ditetapkan sebagian sudah tercapai, namun demikian ada beberapa yang belum mencapai target dikarenakan ada berbagai kendala. Salah satunya pada sasaran penurunan angka stunting dan jumlah rumah tangga miskin, disebabkan Identifikasi rumah tangga miskin yang tidak tepat atau kurang akurat akibatnya program penanggulangan kemiskinan yang ditargetkan tidak tepat sasaran.

Kemudian pemerintah Desa Mekargalih juga melaksanakan SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang mengacu pada Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2019 Tentang SAKIP Desa dan Peraturan Bupati Sumedang No. 86 Tahun 2021 tentang tata cara implementasi dan evaluasi SAKIP Desa. Namun, belum sesuai ketetapan dikarenakan adanya aturan-aturan baru dari pemerintah Kabupaten Sumedang terkait pelaporan, penganggaran, dan lainnya yang menyebabkan pemerintah desa harus beradaptasi terlebih dahulu sehingga dalam pelaporan terlambat dari tenggat waktu yang ditentukan. Hal tersebut menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan perangkat Desa untuk beradaptasi dengan SAKIP Desa yaitu kurang.

Kemudian pelaksanaan SAKIP Desa di Desa Mekargalih dilaksanakan dengan transparan. Transparansi pelaksanaan SAKIP Desa mengacu pada tingkat di mana informasi tentang kinerja pemerintah desa yang tertuang dalam SAKIP Desa diinformasikan secara terbuka dan jelas tersedia bagi masyarakat Desa Mekargalih. Dengan Melalui transparansi yang kuat, pelaksanaan kinerja pemerintah desa menjadi lebih terbuka dan akuntabel. Hal Ini memungkinkan masyarakat Desa Mekargalih untuk memahami apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah desa, memberikan masukan, dan secara efektif memantau progres pembangunan serta memastikan penggunaan anggaran yang tepat.

SAKIP Desa di Desa Mekargalih terkait dalam aspek pencapaian tujuan terdapat peningkatan yang cukup baik dilaksanakan secara transparan namun ada ketidaksesuaian pada target dan realisasi

dalam sasaran penurunan rumah tangga miskin dan IKM. Kemudian kurangnya fleksibilitas dan adaptasi perangkat desa terhadap adanya SAKIP Desa berpengaruh pada pencapaian sasaran yang ingin dituju.

2. Integrasi

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan membangun komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Kaitannya dengan penyelenggaraan sakip desa yaitu integrasi antara seluruh perangkat desa sejak perencanaan strategis hingga implementasi setiap program kegiatan dalam upaya pencapaian visi Desa Mekargalih sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan.

terdapat sosialisasi mengenai implementasi SAKIP Desa seperti yang dilaksanakan di Kecamatan Jatinangor yang melibatkan pihak DPMD Kab. Sumedang. Namun terdapat kendala kekurangan anggaran membuat sosialisasi SAKIP Desa ke Masyarakat Desa dilakukan 4 bulan sekali. sehingga perangkat Desa Mekargalih memanfaatkan sosial media seperti whatsapp group untuk menyebarkan informasi tentang SAKIP Desa kepada Desa Mekargalih.

dapat disimpulkan bahwa pada aspek integrasi dalam pelaksanaan SAKIP Desa di Desa Mekargalih belum terintegrasi dengan maksimal dikarenakan bimbingan teknis yang terbatas yang disebabkan kurangnya keberpihakan anggaran. Namun pemerintah Desa Mekargalih memanfaatkan whatsapp group untuk menyebarkan informasi tentang SAKIP Desa kepada Desa Mekargalih. Koordinasi antar perangkat Desa Mekargalih dalam pelaksanaan

SAKIP Desa juga belum optimal, karena kurangnya bimbingan membuat Sebagian perangkat Desa Mekargalih kurang memahami implementasi SAKIP Desa. Maka dari itu untuk mengatasi kendala tersebut perlu dilakukan sosialisasi yang mendalam kepada perangkat Desa Mekargalih terkait implementasi SAKIP Desa yang melibatkan pihak-pihak lain.

3. Adaptasi

Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Desa di Desa Mekargalih, terdapat beberapa aspek adaptasi yang perlu diperhatikan. SAKIP Desa merupakan alat pengukuran dan evaluasi kinerja pemerintah desa untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan kualitas pelayanan publik. Sarana dan prasarana yang menjadi tolak ukur dari adaptasi di desa mekargalih dapat dikatakan baik namun kurang optimal, Kurang optimalnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan SAKIP Desa di Desa Mekargalih disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang menyebabkan keterbatasan dana untuk mengembangkan infrastruktur seperti memperbaiki perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, atau mengadakan pelatihan tambahan bagi perangkat desa terkait.

kualitas SDM Perangkat Desa mekargalih mampu mengadaptasi SAKIP Desa dikarenakan rentan usia perangkat desa yang tergolong muda sehingga mempunyai peluang mengadaptasi SAKIP Desa. Namun kurangnya pelatihan membuat beban kerja terhadap pelaksanaan SAKIP Desa menjadi tidak seimbang. Sehingga dalam penyesuaian perangkat desa Mekargalih terhadap adanya SAKIP Desa dapat dihadapkan pada beberapa kendala. Pemahaman yang kurang tentang konsep SAKIP Desa, keterbatasan sumber daya manusia, hambatan terhadap perubahan ini adalah beberapa kendala yang dihadapi perangkat Desa Mekargalih.

Dapat disimpulkan bahwa aspek adaptasi dalam penyelenggaraan SAKIP Desa di Desa Mekargalih sarana prasarana maupun kemampuan sumber daya baik manusia ataupun anggaran belum efektif, namun sudah terdapat keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan maupun proses penyesuaian dalam lingkup pemerintah Desa Mekargalih dalam melaksanakan SAKIP Desa di Desa Mekargalih.

Selanjutnya terdapat identifikasi kekuatan,kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) dalam pelaksanaan SAKIP Desa di Desa Mekargalih Kabupaten Sumedang, berikut hasil identifikasi SWOT:

Tabel Hasil Identifikasi SWOT

Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
a. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. b. Penggunaan SAKIP sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja desa. c. Partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program desa.	a. Kurangnya pemahaman dan keterampilan perangkat Desa terkait implementasi SAKIP Desa b. Keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, atau teknologi untuk mendukung implementasi SAKIP Desa secara optimal. c. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara perangkat Desa Mekargalih dalam Pelaksanaan SAKIP Desa di Desa Mekargalih.

Opportunity (Peluang)	Threat (Ancaman)
<p>a. Peluang untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan SAKIP Desa dengan lebih efisien.</p> <p>b. Peluang untuk meningkatkan kerjasama dan pertukaran informasi dengan desa-desa lain atau lembaga lain dalam rangka belajar dan berbagi pengalaman terkait SAKIP Desa.</p> <p>c. Perubahan kebijakan atau regulasi yang mendukung akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa.</p>	<p>a. Perubahan kebijakan atau regulasi yang dapat mempengaruhi implementasi SAKIP desa.</p> <p>b. Ketidakstabilan keuangan desa yang dapat menghambat penyediaan sumber daya untuk melaksanakan SAKIP Desa di Desa Mekargalih.</p> <p>c. Tantangan perangkat Desa Mekargalih dalam mengelola data dan sistem informasi terkait SAKIP Desa.</p>

(Sumber: Diolah Penulis, 2023)

Simpulan

Berdasarkan hasil riset terapan yang sudah penulis lakukan mengenai Efektivitas Sistem Akuntabilitas Pemerintah Desa (SAKIP Desa) di Desa Mekargalih dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan SAKIP Desa di Desa Mekargalih dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas masih belum efektif, dari dimensi pencapaian tujuan kurang terpenuhi secara keseluruhan dalam hal ketepatan waktu serta sasaran yang menjadi target dalam indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan di SAKIP Desa. Dimensi integrasi dari proses dan prosedur sosialisasi belum berjalan sesuai harapan, serta adaptasi terkait sarana prasarana cukup memadai, namun kemampuan sumber daya belum optimal disebabkan terbatasnya anggaran maupun belum didukung oleh manajemen kepegawaian yang tepat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam efektivitas Sistem Akuntabilitas Pemerintah Desa (SAKIP Desa) di Desa Mekargalih kelemahan serta ancaman yaitu kurangnya pemahaman dan keterampilan Perangkat Desa Mekargalih terkait implementasi SAKIP Desa baik disebabkan oleh keterbatasan

sumber daya manusia, keuangan, atau teknologi untuk mendukung implementasi SAKIP Desa di Desa Mekargalih secara optimal. Perubahan kebijakan atau regulasi yang dapat mempengaruhi implementasi SAKIP desa. Hal hal tersebut menghambat dalam pelaksanaan SAKIP Desa di Desa mekargalih.

3. Beberapa Upaya alternatif yang dapat dilakukan pemerintah Desa Mekargalih untuk mencapai efektivitas Sistem Akuntabilitas Pemerintah Desa di Desa Mekargalih yaitu meningkatkan program pelatihan dan pengembangan keterampilan dengan bimtek dan sosialisasi secara mendalam terkait implementasi SAKIP Desa. kemudian Mengadakan pertemuan dan forum dialog untuk mengatasi kurangnya komunikasi dan koordinasi antara perangkat desa Mekargalih. Selanjutnya mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Lalu, meningkatkan partisipasi masyarakat. Dan membangun dan memperkuat kemitraan dengan institusi pendidikan dan penelitian untuk mendapatkan dukungan teknis dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang implementasi SAKIP Desa.

References**Buku**

- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bormasa, M. F. (2022). *Kepemimpinan dan Efektivitas Kerja*. Banyumas: Pena Persada.
- Ekasari, R. (2020). *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. Malang: AE publishing.
- Ibrahim, A. H., & Supriatna, T. (2019). *Epistemologi Pemerintahan Paradigma Manajemen, Birokrasi, dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gramasurya.
- Karianga, H. (2013). *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kencana.
- Mahsun, M. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology : Ilmu Pemerintahan Baru 2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Purnomo, J. (2016). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Infest.
- Rahardi, R. D. (2010). *Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia*. Malang: Tunggal Mandiri.
- Rauf, R., & Maulidiah, S. (2015). *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Janafa.
- Sinambela, P. L. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, K. I. (2011). *Etika Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Syahrizal, D. (2013). *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Medpress Digital.

Jurnal

- Annisah, & Soesilowati, E. (2018). Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Pesanggrahan. *Indonesian Journal of Development Economics*, 44-50.
- Dawais , & Chairunnisa, S. (2013). AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. *JURNAL TELAAH & RISET AKUNTANSI*, 150-174.
- Nani, F. L., Rowa, H., & Martini, A. (2021). Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* , 102-111.
- Yunita, C., Setiana, S., & Cintia, P. (2017). Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintahan Kota Bandung. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 93-103.

Peraturan Perundang Undangan

- Pemerintah Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Lembaran Negara RI Tahun 2010, No. 123. Sekretariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 6 tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 7. Sekretariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 292. Sekretariat Negara. Jakarta

- Pemerintah Indonesia. 2014. Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 80. Sekretariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lembaran Negara RI Tahun 2015, No. 986. Sekretariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Indonesia 2017. Peraturan Menteri Pertahanan No. 16 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementrian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2017. Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Sumedang. 2019. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2019 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Desa. Kabupaten sumedang Tahun 2019. Badan Daerah. Sumedang
- Pemerintah Kabupaten Sumedang. 2020. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Tatacara Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Desa. Kabupaten Sumedang Tahun 2020. Badan Daerah. Sumedang.
- Pemerintah Indonesia 2017. Peraturan Menteri Pertahanan No. 16 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementrian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2017. Jakarta

Lain Lain

- Pemerintah Desa Mekargalih Kabupaten Sumedang. Dokumen Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2026. Pemerintah Desa Mekargalih, Sumedang. 105 hal.
- Pemerintah Desa Mekargalih Kabupaten Sumedang. Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LLPD) Akhir Tahun Anggaran 2022. Pemerintah Desa Mekargalih, Sumedang. 81 hal.
- Kabupaten sumedang. E- Office Kabupaten Sumedang dari <https://e-officedesa.sumedangkab.go.id/>

Acknowledgment

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Desa Mekargalih, serta seluruh informan yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan informasi serta data-data yang dibutuhkan bagi penulis untuk menyusun Skripsi Sarjana Terapan mengenai Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa (SAKIP Desa) di Desa Mekargalih Kabupaten Sumedang.